

**TINJAUAN YURIDIS AKIBAT HUKUM DALAM PERBUATAN
WANPRESTASI PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG (STUDI
PUTUSAN PN DENPASAR NO. 1302/PDT.G/2024/PN DPS)**

Oleh

Ni Luh Yossi Shuartini Millenia, Nim 1914101097

Program Studi Ilmu Hukum

ABSTRAK

Istilah wanprestasi dalam hukum perikatan merupakan cidera janji, Pembicaraan tentang wanprestasi, baik dalam doktrin maupun yurisprudensi biasanya dikaitkan dengan pernyataan lalai dari pihak debitur, dimana debitur telah tidak memenuhi kewajiban prestasi perikatannya dengan baik, dan debitur punya unsur salah atasnya. Harus diakui bahwa ingkar janji atau cidera janji, sudah ada itikad tidak baik pada orang yang tidak memenuhi janjinya tersebut. Adanya wanprestasi tidak terlepas dari adanya perjanjian kredit yang dibuat apakah seorang debitur wanprestasi memang tidak bisa serta merta ditentukan karena ada upaya-upaya dalam penyelamatan kredit yang masuk pada tahap bermasalah. Awal dari pelanggaran sebuah perjanjian atau wanprestasi karna seorang tidak kunjung dibayarkan, dalam memenuhi standarisasi penyelamatan kredit pada bank, biasanya dilakukan upaya-upaya seperti Penjadwalan Kembali (*rechsceduling*), Persyaratan kembali (*reconditioning*), Penataan Kembali (*restrucuring*), melalui penyelamatan itu, debitur diberikan kesempatan untuk kerugian terhadap usahanya, maka konsep wanprestasi dalam BW dan Undang-Undang Perbankan haruslah diukur melalui prestasi yang diberikan, dalam kedua peraturan tersebut, lalu dari situ dapat diklasifikasikan konsep kredit bermasalah dalam. Peraturan perbankan ini apakah dapat dikatakan wanprestasi, perbandingan konsep inilah yang menjadi pembahasan di dalam skripsi ini.

Kata Kunci: Akibat Hukum, Perjanjian Kredit, Wanprestasi, Perlindungan Hukum, Pelanggaran

***A LEGAL REVIEW OF THE LEGAL CONSEQUENCES OF BREACH OF A
LENDING AGREEMENT (STUDY OF DENPASAR PN DECISION NO.
1302/PDT.G/2024/PN DPS)***

By

Ni Luh Yossi Shuartini Millenia, Nim 1914101097

Law Study Program

ABSTRACT

The term default in contract law is a breach of promise. Discussions about default, both in doctrine and jurisprudence, are usually associated with a statement of negligence from the debtor, where the debtor has not fulfilled his obligation to perform the contract properly, and the debtor has an element of fault for it. It must be acknowledged that a breach of promise or breach of promise, there is already bad faith on the part of the person who does not fulfill his promise. The existence of default is inseparable from the existence of a credit agreement made whether a debtor is in default cannot be immediately determined because there are efforts to rescue credit that has entered a problematic stage. The beginning of a violation of an agreement or default due to someone not being paid, in meeting the credit rescue standards at the bank, usually efforts are made such as Rescheduling, Reconditioning, Restructuring, through this rescue, the debtor is given the opportunity to lose his business, so the concept of default in BW and the Banking Law must be measured through the achievements given, in both regulations, then from there the concept of problematic credit can be classified. This banking regulation can be said to be a default, the comparison of this concept is the discussion in this thesis.

Keywords: Legal Consequences, Credit Agreement, Default, Legal Protection, Violation